

# DELIK HUKUM

## Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi, LPKA Kutoarjo Ikuti Kuliah Umum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dedy Winarto - [KUTOARJO.DELIKHUKUM.ID](http://KUTOARJO.DELIKHUKUM.ID)

Jul 14, 2023 - 09:47



*Kuliah Umum Anti Korupsi dari KPK*

KUTOARJO – Dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi pada setiap pegawai, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo mengikuti Kuliah Umum dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu (12/7).

Kuliah umum tersebut di ikuti secara virtual itupun di ikuti oleh Kepala LPKA Kutoarjo beserta jajaran serta seluruh pegawai yang menyimak dan mengikuti

dengans seksama pada ruang kerja masing-masing bidang.

Kegiatan diawali dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Rampasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KM.6/2023

Tanggal 31 Maret 2023, berupa :

1. Tanah dan bangunan gudang yang beralamat di jalan Gempol Sari No. 89, Kota Bandung
  2. 2 Unit Kendaraan roda empat yaitu Isuzu NLR 50 Tahun 2020 Nomor Polisi KT 7348 CB dan Daihatsu Siga 1.2 MTX Tahun 2020 Nomor Polisi KT 1967 KY
- Sambutan pertama disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Di dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa serah terima yang telah dilakukan akan membantu serta meningkatkan operasional di Kementerian Hukum dan HAM.

“Tanah dan bangunan akan digunakan untuk mendukung operasionalisasi Rubasan Bandung dan 2 kendaraan roda 4 akan dioperasikan pada kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Timur dan Rubasan Samarinda”, ujarnya.

Yasona juga mengatakan serah terima ini merupakan bentuk sinergi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terutama dalam penanganan dan penyelesaian barang rampasan yang merupakan upaya pemulihan asset atau asset recovery. Selanjutnya, Kuliah Umum yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan oleh Firli Bahuri. Firli menyampaikan pengertian terkait tindak pidana korupsi, alasan terjadi tindak pidana korupsi, data penindakan KPK, Strategi Pemberantasan Korupsi.(SA)